

## KONSEP *BLUE ECONOMY* TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Nota Morra Banu Ghalidza<sup>1</sup>

Email: notambg@gmail.com

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya

**Abstract:** *Indonesia is one of the countries with the longest coastline in the world, where its use only around 59%, therefore the potential of sea is very feasible to be developed and studied in depth. Blue economic itself is closely related to Minapolitan, an inter firm linkage concept. The concept will be able to become a new supporting sector in the economy and can increase the productivity of marine and fisheries in Indonesia.*

**Keywords :** *blue economy, minapolitan, productivity*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Maritim. Luas wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, namun baru dimanfaatkan sekitar 59% dari total potensi sumber daya perikanan atau laut Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Dari data BPS juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ke -3 dengan garis pantai terpanjang di dunia. Potensi yang tersimpan sangatlah besar didalam keberlimpahan tersebut. Baik sumber daya hayati maupun non hayati.

Menyikapi hal tersebut diperlukan gagasan yang cemerlang untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di laut Indonesia agar kedepannya tercipta pembangunan yang tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan. Pembangunan ini mengedepankan laut sebagai sumber daya utamanya. Dimana pada saat ini kelautan Indonesia termasuk didalamnya penduduk pesisir kurang diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Tercermin dari masih rendahnya tingkat harapan hidup masyarakat pesisir. Selain itu dari sisi sosial ekonomi, masyarakat pesisir yang memiliki lingkungan dengan sejuta potensi yang terkandung masih harus berada di garis kemiskinan dengan keterbatasan akses-akses negara termasuk akses pendidikan.

Laut Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Dengan diversifikasi biota dan potensi sumber daya alam yang terkandung sudah sepatutnya paradigma pembangunan ekonomi di arahkan ke laut dan pesisir. Lautan yang sangat luas ini, menyediakan komoditas ekspor yang besar berupa komoditas perikanan. Dimana perikanan merupakan komoditas yang unggul

karena banyak negara-negara maju sangat meminati komoditas ikan ini.

Merujuk pada permasalahan tersebut, nyatanya sejak era pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ekonomi kelautan (*blue economy*) belum mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia karena :

1. Meminjam pemikiran Gus Dur, *mindset* pembangunan ekonomi Indonesia lebih didominasi cara berpikir continental ketimbang kelautan dan maritim. Hegemoni cara berpikir continental ini telah mengingkari fakta empiris dan alamiah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang  $\frac{3}{4}$  wilayahnya berupa laut.
2. Berbagai kalangan berpendapat bahwa memposisikan ekonomi kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional berimplikasi luas karena akan mengubah secara radikal berbagai nomenklatur, kebijakan politik anggaran, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Kalangan intelektual ekonom di Indonesia, parlemen, birokrat relative kurang melek terhadap soal kelautan dan perikanan hingga kerap berfikir mengikuti aliran pemikiran ekonomi arus utama dengan ideology neo-liberalismenya ketimbang menyempal dan membangun gagasan-gagasan baru yang bersifat konstruksional.

Dari sejumlah temuan tersebut sudah pasti sulit membangun paradig baru didalam ekonomi kelautan sebagai alternative pembangunan ekonomi yang lebih potensial, mengingat sumber daya kelautan di Indonesia masih kurang dimaksimalkan. Sedangkan pemabangunan ekonomi yang mengarah di daratan teelah mengalami berbagai hambatan sperti semakin

berkurangnya lahan karena reklamasi lahan menjadi pemukiman atau pun tempat industry.

Sangat disayangkan asset yang berharga ini jika tidak dimaksimalkan. Dengan kekayaan yang ada jika dimanfaatkan dengan baik maka akan melahirkan potensi baru dalam pertumbuhan ekonomi negara. Karena kelautan masih sangat diminati oleh negara-negara di dunia.

Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mencari cara agar potensi yang sangat besar dari sektor kelautan ini dapat termanfaatkan dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Blue Economy*

*Blue economy* atau ekonomi biru merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan sebagai focus utama. Dalam pengembangannya diperlukan inovasi yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dalam ekonomi biru juga termasuk didalamnya konsep *minapolitan*.

### Konsep Minapolitan

Minapolitan berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. ((Greenberg, 2015)

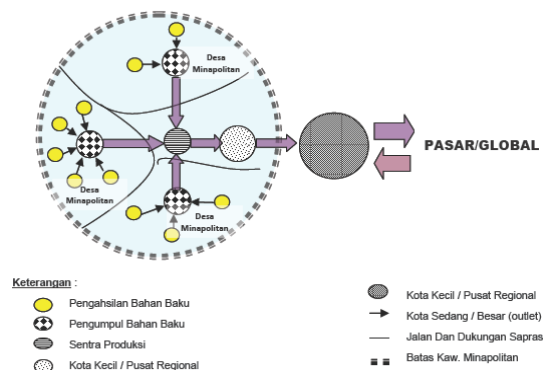
Konsep pembangunan ini sejalan dengan arah umum pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan sebagaimana tertuang di dalam Buku I RPJM Tahun 2010-2014. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif dengan konsep Minapolitan. Sebagai langkah nyata, telah diterbitkan Peraturan Menteri nomer KEP.18/MEN/2011 tentang pedoman umum minapolitan (KEP.18/MEN/2011)

Konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan

masyarakat, dan 3) penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip-prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan mencakup berbagai hal. Pertama, meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas. Kedua, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata. Ketiga, mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Konseptual Minapolitan mempunyai dua unsur utama. Pertama, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Kedua, Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait (Sunoto, 2010).



Sumber : Kolopaking dkk, 2010

Gambar 1. Gambar Konsep Wilayah Minapolitan

Pada intinya, Minapolitan menggunakan konsep *inter firm linkage* untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan nasional agar kompetitif di pasar global. Kemampuan melakukan kerjasama terbukti dapat meningkatkan daya saing usaha kecil karena mereka mampu mengakses sumber daya dalam jumlah besar tanpa harus melakukan merger. Usaha kecil hanya perlu menjaga fleksibilitas mereka, yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ((Ronitua & Pakpahan, 2012)).

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Kelautan, 2014).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Cahyasari, 2017).

(Sukarniati & Khoirudin, 2017) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

### **METODE PENULISAN**

Penulisan ini menggunakan pendekatan diskriptif dan kualitatif dengan metode kepustakaan. Pembahasan yang dihasilkan bersifat uraian atau penjelasan berdasarkan analisis dari data yang diperoleh.

### **PENGUMPULAN DATA**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk buku, laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, makalah serta jurnal yang terkait. Sumber pencarian data adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jurnal ekonomi, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

## TEKNIK ANALISIS

Penulisan makalah ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara membaca data-data, membandingkan, dan menganalisis sesuai dengan teori ekonomi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai. Hasil analisisnya berupa diskripsi yang bersifat rekomendatif.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Blue Economy* dan efeknya terhadap perekonomian

Blue economy merupakan konsep paradigm baru dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan laut sebagai input utama dalam pembangunannya. Dari definisi tersebut mengarah pada kekayaan apa saja yang ada di dalam laut yang dapat dieksplorasi sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Namun dalam eksplorasi tersebut tetap mengedepankan keberlanjutan dari input produksinya.

Blue economy erat kaitannya dengan konsep minapolitan yaitu konsep *inter firm linkage* untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan nasional agar kompetitif di pasar global. Fakta bahwa Indonesia memiliki laut yang luas membuat Indonesia juag kaya akan potensi sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan tersebut tidak hanya yang terdapat di lautan tetapi juga perikanan budidaya laut dan budidaya darat.

Data FAO tahun 2009 menjelaskan bahwa kondisi jumlah produksi perikanan Indonesia mencapai angka kisara 5 juta ton pertahun, yang mengalami peningatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,8 juta ton per tahunnya. Produksi perikanan tersebut sudah termasuk perikan budidaya yang dikembangkan menggunakan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan.

Minapolitan sebagai konsepsi yang mengedepankan akselerasi tinggi dalam pembangunan ekonomi kelautan dan pesisir nantinya akan menghasilkan output yang sangar potensial bagi negara. Dalam konsep ini nantinya pesisir akan di arahkkan sehingga akan setara dengan derah pusat baik dari segi infrakstuktur dan keterjangkauanya terhadap pasar. Ketika banyak infrastruktur telah tersedia maka akan mengurangi biaya baik biaya produksi maupun biaya transportasi menuju ke market.

Dari fakta fao yang menunjukkan jumlah yang cukup besar dalam komoditas perikanan maka jika teralisasi dengan menggunakan inovasi dan teknologi yang tepat guna, sehingga produksi perikanan nasional akan terus bertambah pada setiap waktunya, akhirnya terpenuhilah kebutuhan pangan yang berasal dari sektor kelautan dan perikana Indonesia.

Surplus dari komoditas akan dapat diarahkan dan dipasarkan ke pasar luar negeri dimana permintaan untuk komoditas ini sangatlah tinggi. Melalui jalan ekspor komoditas maka negara akan mendapatkan kentungan yang besar dalam bentuk devisa. Devisa yang terkumpul dapat dialokasikan pada sektor lain yang membutuhkan untuk diperluas (*ekpansi*). Sehingga nantinya sektor laut dan perikanan melalui konsep *Blue Economy* akan menjadi sektor penopang baru dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena dalam realisasi konsep ini telah dibangun sentra sentra baik berupa infrastruktur pengembang dan fasilitas lain yang menunjang aktifitas ekonomi pesisir dan kelautan.

Sehingga dapat di tarik beberapa point terkait dampak konsep *blue Economy* terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia :

1. Konsep ini mngedepankan peningkatan produksi kelautan
2. Dalam penerapannya produktifitas kelautan akan menjadi sektor utama dalam sumbangan pendapatan nasional.
3. Jumlah produksi perikanan yang sangat berlebih dapat digunakan sebagai komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa.
4. Dengan berkembangnya sektor kelautan dalam konsep *blue Economy* tidak saja sektor perikanan, namun sektor lain akan juga ikut terdorong karena potensi kelautan Indonesia meliputi sumber daya hayati dan non hayati seperti minyak bumi dan bahan-bahan tambang yang lain yang dapat berkontribusi tinggi dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
5. *Blue Economi* dapat menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena bersifat ramah lingkungan dan mengedepankan keberlangsungan ekosistem.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin, pertama kebijakan blue economy merupakan terobosan baru yang dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia karena mengingat Indonesia kaya akan potensi hayati dan non hayati yang terkandung di lautan indonesia. Kedua konsep minapolitan dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan *blue Economy* karena akan terdapat *interlinkage* yang sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional dan Negara. Ketiga konsep minapolitan akan menghasilkan produktifitas perikanan dan kelautan Indonesia menjadi lebih optimum sehingga akan dimungkinkan melakukan ekspor komoditi yang nantinya akan menjadi sumber pundi-pundi devisa negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi di sektor lainnya yang membutuhkan untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya sektor kelautan dalam kebijakan *blue Economy* nantinya akan dapat menjadi pilar atau tumpuan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyasari, W. (2017). *Model Blue Economy Di Kawasan Asia Pasifik* (Studi Kasus: Penerapan Model Blue Economy Pada Industri Perikanan Indonesia). *感染症誌*, 91(1), 399–404.
- Greenberg, J. R. (2015). The era of shinplasters: Making sense of unregulated paper money. *Capitalism by Gaslight: Illuminating the Economy of Nineteenth-Century America*, (801), 53–75.
- Kelautan, P. P. (2014). blue economy, (16).
- Ronitua, A., & Pakpahan, S. (2012). Economics Development Analysis Journal. *Edaj*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70862-4](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70862-4)
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Jurnal Ekonomi Pembangunan Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy pada Tambak Udang ( Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul ), 3(2), 52–65.